



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

TRIWULAN I
TAHUN 2025



**DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 01 April 2025

Direktur Ikan Air Laut



Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	2
D A F T A R I S I.....	3
D A F T A R G A M B A R.....	5
D A F T A R T A B E L.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2025 Budidaya.....	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	16
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut	21
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	21
IKSK 1. Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	21
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT .	22
IKSK 3. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT	24
IKSK 4. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	25
IKSK 5. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	27
IKSK 6. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT	28
IKSK 7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	29
IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	31
IKSK 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji	32
IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	33
IKSK 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	34
IKSK 12. Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) Yang Diuji	34
IKSK 13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	37

IKSK 14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	38
SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	38
IKSK 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	38
IKSK 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	40
IKSK 17. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	44
IKSK 18. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	45
IKSK 19. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.	46
IKSK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	48
IKSK 21. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	49
BAB IV. PENUTUP	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2025-202	17
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2025-202	18
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	18
Gambar 7. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan I Tahun 2025	18
Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I 2025.....	51

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025.....	19
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	21
Tabel 3. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT.....	22
Tabel 4. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	23
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	24
Tabel 6. Capaian Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat.....	25
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	26
Tabel 8. Capaian Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat.....	27
Tabel 9. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang Diproduksi untuk Operasional UPT	29
Tabel 10. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	30
Tabel 11. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	31
Tabel 12. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan I Tahun 2025	31
Tabel 13. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji	32
Tabel 14. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji di BBPBL Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	32
Tabel 15. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025.....	33
Tabel 16. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	33
Tabel 17. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	34
Tabel 18. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di BPKIL Serang Triwulan I Tahun 2025.....	34
Tabel 19. Capaian Sampel Surveilans <i>Anti Microbial Resistance</i> (AMR) yang Diuji	35
Tabel 20. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan I Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB.....	36
Tabel 21. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	37
Tabel 22. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	38
Tabel 23. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	39
Tabel 24. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	44

Tabel 25. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	45
Tabel 26. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	45
Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2025	46
Tabel 28. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	47
Tabel 29. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	49
Tabel 30. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan I Tahun 2025, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025:

- a) Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu: (i) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (Ekor), (ii) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iii) Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iv) Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji (Sampel) dan (v) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel) .

- b) Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji (Sampel) dan (ii) Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (%).

- c) Terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan I, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 7 (delapan) indikator kinerja, yaitu : (i) Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit), (ii) Produksi Calon Induk Kepiting untuk operasional UPT (Ekor), (iii) Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg), (iv) Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit), (v) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan), (vi) Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang) dan (vii) Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu : (i) Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai), (ii) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iii) Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iv) Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (v) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) dan (vi) Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 19,05% Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, 14,3% sesuai target yang ditetapkan dan 66,67% Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan I. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori **“Istimewa”** dengan nilai **111,77**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 2.260 ekor di BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPIUUK Karangasem;
2. **IKU 4. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 306.982 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIUUK Karangasem, BPBAP Takalar;
3. **IKU 5. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 50.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
4. **IKU 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 2.013 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
5. **IKU 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel pakan ikan air laut sebanyak 5 sampel di BBPBL Lampung;
6. **IKU 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 10 sampel di BPKIL Serang;
7. **IKU 12. Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) sebanyak 27 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam;

8. **IKM 18. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan IV Tahun 2024 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 92,68%.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

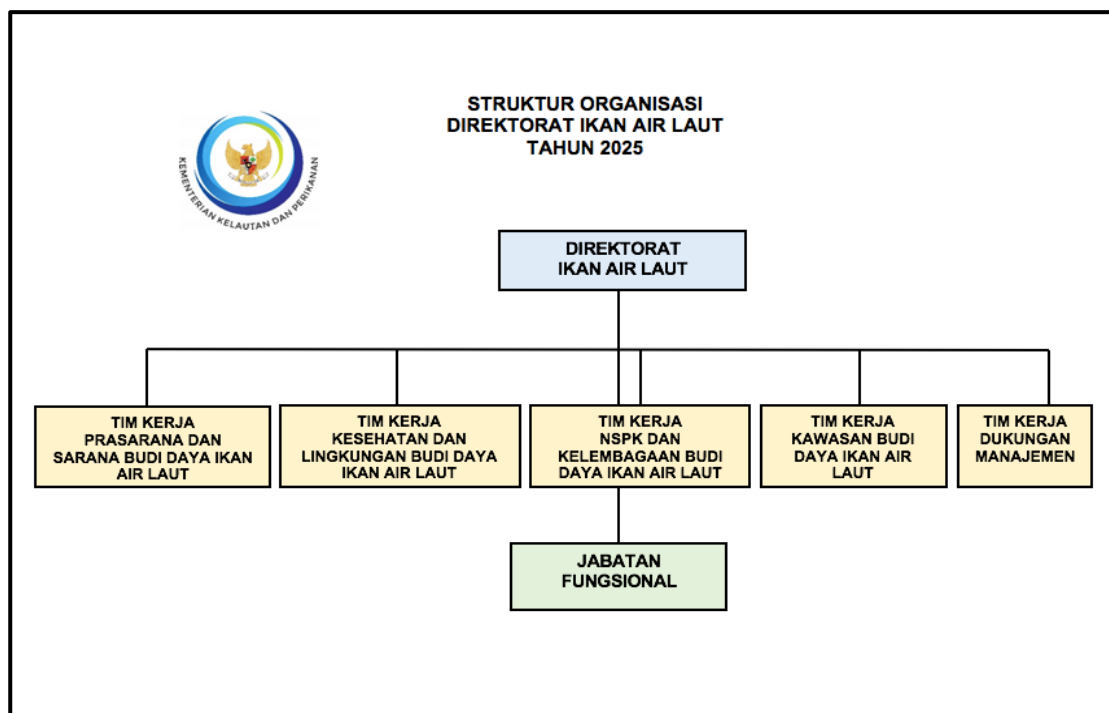
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

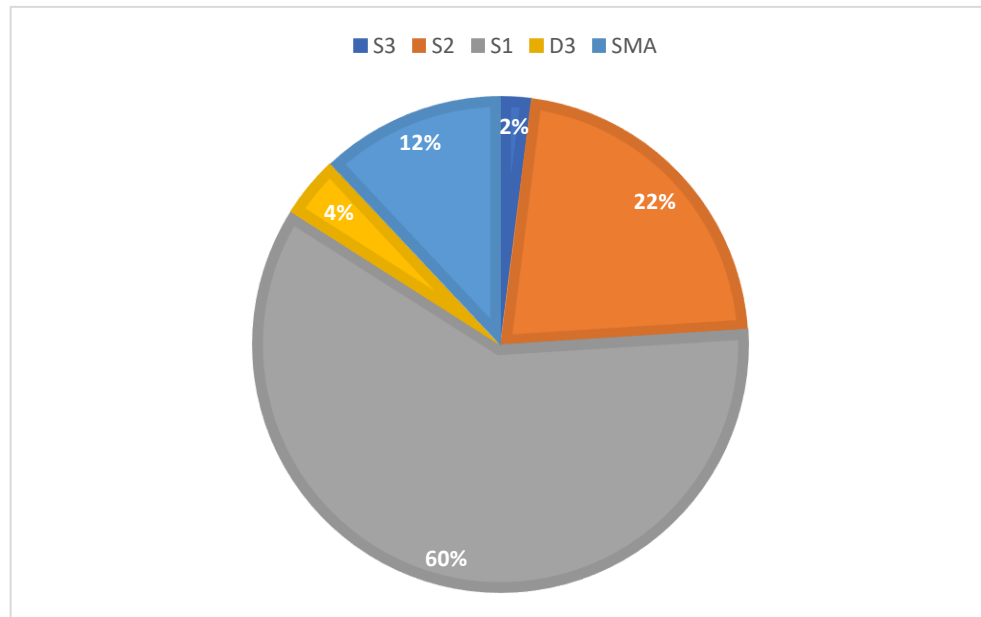
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

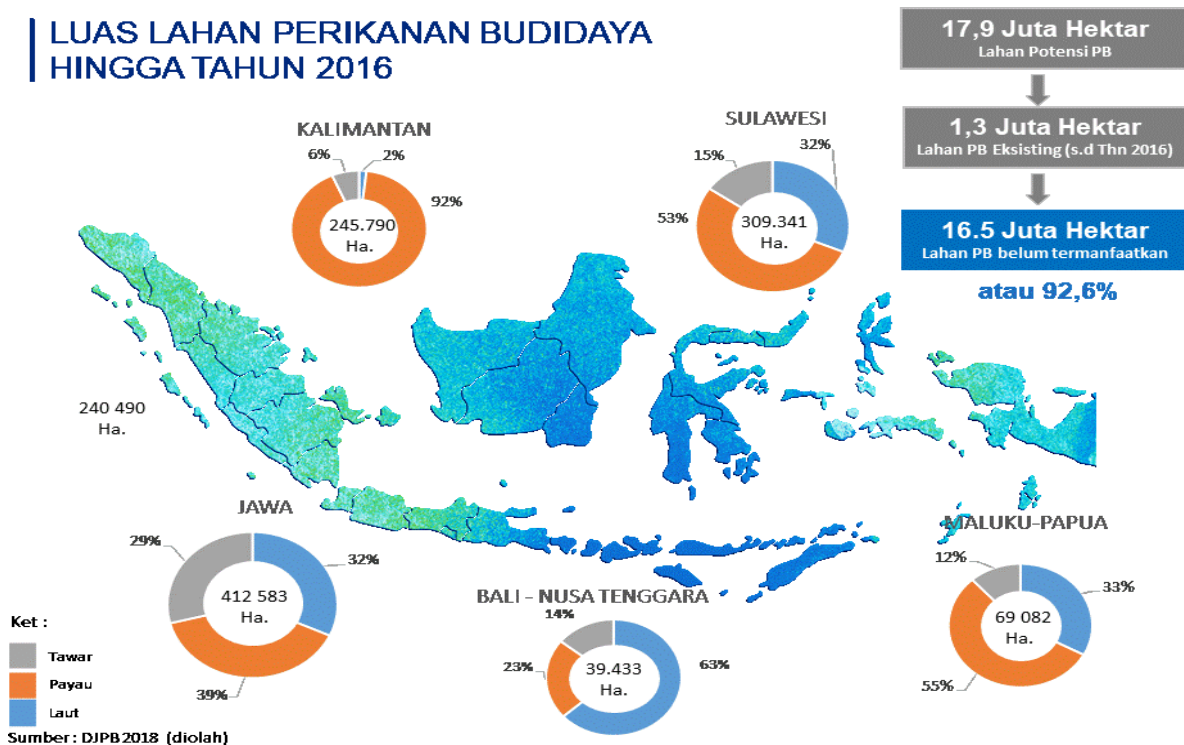
- Pegawai Negeri Sipil 40 orang,
- Pegawai PPPK 4 orang dan
- Pegawai Tenaga Kontrak 7 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Ikan Air Laut tersebar di Timja Dukungan Manajemen sebanyak 3 (tiga) orang, Timja Pembangunan Kawasan Budi Daya 2 (dua) orang, dan Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya sebanyak 2 (dua) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen

untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat

pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 selama kurun waktu Januari – Maret 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772 LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dijepb@kkp.go.id														
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT IKAN AIR LAUT														
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :														
Nama	:	Tinggal Hermawan												
Jabatan	:	Direktur Ikan Air Laut												
Selanjutnya disebut	:	Pihak Pertama												
Nama	:	Tb Haeru Rahayu												
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya												
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut	:	Pihak Kedua												
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.														
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.														
Jakarta, 10 Januari 2025														
Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya		Pihak Pertama Direktur Ikan Air Laut												
 Tb. Haeru Rahayu		 Tinggal Hermawan												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Lembar Pengesahan</th></tr><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Paraf</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sesditjen PB</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Kepiditjen PB</td><td></td></tr></tbody></table>			Lembar Pengesahan			No	Jabatan	Paraf	1.	Sesditjen PB		2.	Kepiditjen PB	
Lembar Pengesahan														
No	Jabatan	Paraf												
1.	Sesditjen PB													
2.	Kepiditjen PB													

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	20
		2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037
		3. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89
		4. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489
		5. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574
		6. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927
		7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	23
		8. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976
		9. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17
		10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		12. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000
		14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84
		16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81
		17. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85
		19. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
		20. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70
		21. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut


Tb. Haeru Rahayu


Tinggal Hermawan

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	11.156.622.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	358.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		11.514.622.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut

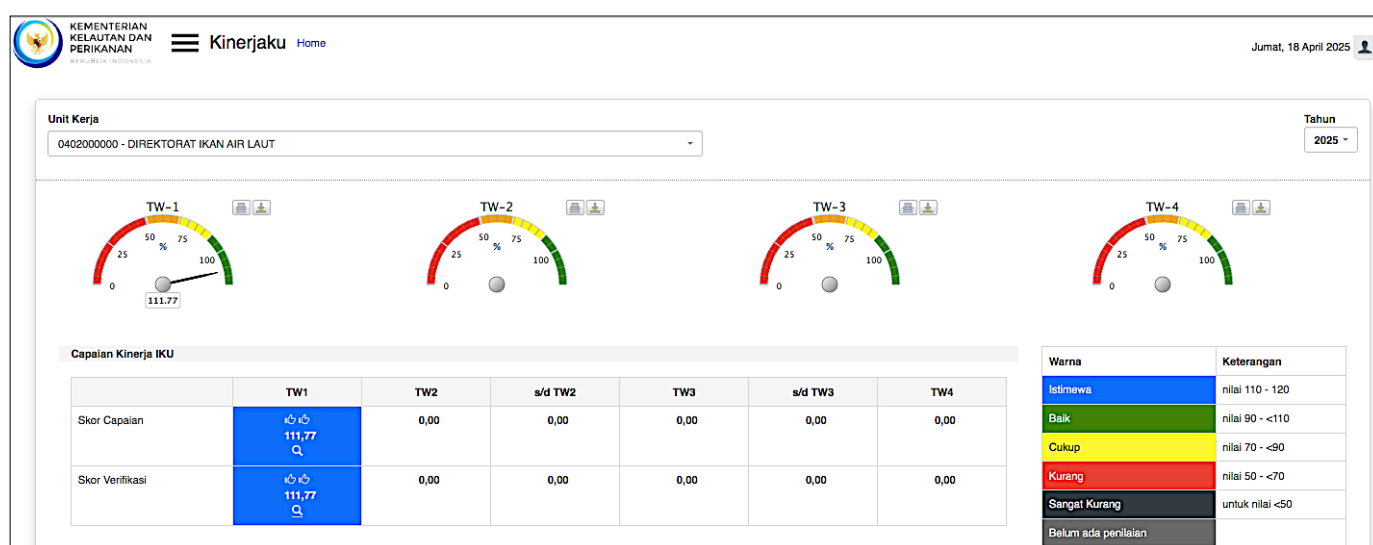


Tinggal Hermawan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 7. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 5 (lima) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasicapaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW I	Realisasi TW I	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1.	Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	20	Tahunan	0	0	0
		2.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037	Triwulan	1.850	2.260	122,1
		3.	Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89	Triwulan	0	0	0
		4.	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489	Triwulan	214.150	306.982	143,3
		5.	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574	Triwulan	26.186	50.000	190,9
		6.	Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927	Triwulan	0	0	0
		7.	Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	23	Tahunan	0	0	0
		8.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka	1.976	Triwulan	530	2.013	379,8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW I	Realisasi TW I	%
			pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)					
		9.	Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17	Triwulan	5	5	100
		10	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6	Tahunan	0	0	0
		11	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70	Triwulan	10	10	100
		12	Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75	Triwulan	13	27	207,7
		13	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000	Tahunan	0	0	0
		14	Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1	Tahunan	0	0	0
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	15	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84	Semesteran	0	0	0
		16	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81	Semesteran	0	0	0
		17	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100	Tahunan	0	0	0
		18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	Triwulan	85	92,86	109,3
		19	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80	Tahunan	0	0	0
		20	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70	Tahunan	0	0	0
		21	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65	Tahunan	0	0	0

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indicator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 14 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat

Indikator Sarana Budi Daya Ikan Laut merupakan sarana budi daya berupa Keramba Jaring Apung yang disalurkan kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan sehingga dapat meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 20 unit yang diukur pada akhir tahun. Pada tahun 2025, nomenklatur indikator tersebut merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya. Sebagai dampaknya, maka capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan realisasi bantuan keramba jaring apung yang telah disalurkan ke masyarakat. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (Keramba Jaring Apung) kepada kelompok penerima. Jumlah bantuan sarana budi daya ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada Tahun 2025 berjumlah 20 unit. Pencapaian indikator sarana budi daya ikan laut yang disalurkan berupa keramba jaring apung menjadi tanggung jawab Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	20	-	-	0	0	

Capaian Indikator kinerja sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke Masyarakat baru akan dilakukan pengukurannya pada akhir Tahun. Pada TW I, sarana budi daya

(keramba jaring apung) yang disalurkan kepada masyarakat masih belum ada capaian, hal tersebut dikarenakan penghitungan capaian dilakukan pada saat proses serah terima alat keramba jaring apung kepada kelompok penerima. Progres pada kegiatan TW I yakni penyusunan petunjuk teknis (juknis) pada bantuan keramba jaring apung (KJA). Secara umum tahapan pendistribusian keramba jaring apung ke masyarakat, dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL); (2) verifikasi dan penetapan CPCL; (3) persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (4) serah terima bantuan keramba jaring apung; dan (5) penyusunan laporan pemanfaatan oleh kelompok penerima bantuan keramba jaring apung.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya yaitu memproses petunjuk teknis menjadi peraturan dirjen yang disahkan. Selain itu mengecek proposal yang diusulkan oleh masyarakat pada bantuan keramba jaring apung. Anggaran yang terserap pada indikator kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat mencapai 2.12% yaitu 14,936,700 dari pagu Rp 705,973,000.

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada indikator tersebut dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem. Produksi calon induk unggul ikan air laut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT lingkup DJPB.

Target indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 10.037 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	10.037	1.875	2.260	121	22,52	-

Pada tabel diatas realisasi TW I pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 2.260 ekor dari target TW I yakni 1.875 sedangkan pada target tahunan 10.037 ekor. Pada penghitungan realisasi TW I tersebut, capaian triwulan pertama pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 121%, sedangkan capaian mencapai 22,52% pada target tahunan. Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT.

No	Nama UPT	Target 2025	Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	1.351	0	0	0
2	BPBAP Situbondo	4.453	0	0	0
3	BPBAP Ujung Batte	199	0	0	0
4	BPBL Ambon	1.142	30	50	167%
5	BPBL Batam	1.820	1.820	2.040	112%
6	BPBL Lombok	948	0	0	0
7	BPIUUK Karangasem	124	25	170	680%
Total		10.037	1.875	2.260	121%

Pada tabel diatas diketahui bahwa IKU produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional pada 7 UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 berbeda-beda, produksi calon induk unggul pada ikan air laut tertinggi dihasilkan oleh BPIUUK Karangasem dengan prosentase capaian sebesar 680%, BPBL Ambon sebesar 167%, BPBL Batam sebesar 112%, sedangkan pada BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batte, dan BPBL Lombok belum ada produksi. Data tersebut menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tata kelola budi daya yang diterapkan oleh setiap balai terkait teknis penanganan komoditas, perbedaan jenis komoditas budi daya. Perbedaan jenis komoditas ikan air laut yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calon induk yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan pada periode selanjutnya dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas calon induk unggul ikan air laut yang dihasilkan antara lain melalui penerapan biosecurity di lingkungan budi daya secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan diberikan secara tepat ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate calon induk ikan air

laut, dan mengoptimalkan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di satker tersebut. Untuk menghasilkan calon induk yang unggul dilakukan juga upaya peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain : BBPBL Lampung mencapai Rp 126.072.000 (34,56%) dari pagu Rp 364.794.000, BPBAP Situbondo mencapai Rp 23.109.200 (1,92%) dari pagu Rp 1.202.344.000, BPBAP Ujung Batte mencapai Rp 76.023.500 (74,3%) dari pagu Rp 102.283.000, BPBL Ambon mencapai Rp 305.968.000 (100%) dari pagu Rp 305.968.000, BPBL Batam mencapai Rp 207.160.000 (53,80%) dari pagu Rp 385.000.000, BPBL Lombok mencapai 0 (0%) dari pagu Rp 255.960, dan BPIUUK Karangasem mencapai Rp 1,350,000 (45%) dari pagu Rp 3,000,000.

IKSK 3. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan salah satu kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang bertanggungjawab pada pelaksanaan indikator tersebut adalah BBPBAP Jepara. Produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul kepiting yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT tersebut.

Target indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 89 ekor, dimana pada TW I tidak ada target. Capaian indikator produksi calon

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	89	-	-	-	-	

Pada tabel diatas diketahui TW I pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT belum ada capaian, hal tersebut dikarenakan kepiting masih dalam proses pemeliharaan. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu melaksanakan produksi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk produksi calon induk kepiting yang unggul di BBPBAP Jepara.

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT mencapai Rp 2.365.000 (71,02%) dari pagu Rp 3.330.000.

IKSK 4. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator jumlah benih ikan air laut yang direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat, yang berhasil disalurkan secara aktual. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penyaluran benih ikan air laut dalam mendukung pembudidayaan ikan oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem.

Target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 1.774.489 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 6. Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	1.774.489	276.150	306.982	111	17,30	-

Pada tabel diatas realisasi TW I pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 306.982 ekor dari target TW I 276.150 ekor. Pada penghitungan realisasi TW I tersebut, capaian triwulan pertama pada indikator benih

ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 111%, sedangkan capaian mencapai 17,30% pada target tahunan. Realisasi dan capaian pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT	Target 2025	Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	515.495	150	1.982	1321.33%
2	BPBAP Takalar	19.073	0	0	0
3	BPBAP Ujung Bate	84.586	20.000	96.000	480.00%
4	BPBL Ambon	423.586	89.000	96.000	107.87%
5	BPBL Batam	384.261	125.000	61.000	48.80%
6	BPBL Lombok	269.531	41.000	51.000	124.39%
7	BPIUUK Karangasem	77.957	1.000	1.000	100.00%
Total		1.774.489	276.150	306.982	111%

Pada data realisasi bantuan benih ikan air laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah direncanakan yaitu 306.982 dengan presentase capaian pada TW I mencapai 111%, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik. Pada data diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker BPBAP Ujung Bate tertinggi diantara satker lain. Perbedaan target dan nilai realisasi bantuan benih ikan air laut disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya BPBL Batam dengan jenis komoditas bawal bintang, BPBL Ambon dengan kakap putih dan clownfish, sedangkan BPBL Lombok dengan ikan bawal bintang, kakap putih, dan tiram mutiara pada triwulan pertama.

Perbedaan tata kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis. Pada proses produksi benih ikan konsumsi, selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan biosecurity di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Dalam pemberian benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budi daya benih. Dalam pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan. Sedangkan pada manajemen kesehatan ikan, dilakukan treatment apabila benih ikan terjadi infeksi terhadap serangan penyakit.

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing satker antara lain : BBPBL Lampung mencapai Rp 488.537.216 (15,79%) dari pagu Rp 3.092.968.000, BPBAP Takalar mencapai Rp 5.175.000 (4,52%) dari pagu Rp 114.438.000, BPBAP Ujung Batte mencapai Rp 290.907.300 (86,8%) dari pagu Rp 335.172.000, BPBL Ambon mencapai Rp 705.186.204 (53,05%) dari pagu Rp 1.329.391.000, BPBL Batam mencapai Rp 481.531.001 (41,90%) dari pagu Rp 1.149.181.000, BPBL Lombok mencapai Rp 372.107.480 (34,55%) dari pagu Rp 1.076.900.000, dan BPIUUK Karangasem mencapai Rp 146.407.308 (39,39%) dari pagu Rp 371,675,000.

IKSK 5. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat adalah bantuan pemerintah dengan perhitungan jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kelompok penerima yang sudah ditetapkan. Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Indikator benih kepiting yang disalurkan kepada masyarakat digunakan dalam efektifitas dan efisiensi penyaluran benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dalam mendukung pembudidayaan kepiting oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh BPBAP Takalar sebagai penanggungjawab pelaksana bantuan.

Target indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 174.574 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target BPBAP Takalar. Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 8. Capaian Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	174.574	26.186	50.000	190.94	28.64	-

Pada tabel diatas realisasi TW I pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 50.000 ekor dari target TW I 26.186 ekor. Pada penghitungan realisasi TW I tersebut, capaian triwulan pertama pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 190,94%, sedangkan capaian mencapai 28,64%

pada target tahunan. Realisasi dan capaian pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama UPT	Target 2025	Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)
1	BPBAP Takalar	174.574	26.186	50.000	190,94%

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya yaitu melakukan produksi benih kepiting. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghasilkan benih kepiting yang tepat kualitas, kuantitas maupun waktu, dengan memanfaatkan berbagai faktor yang diduga berpengaruh positif, antara lain dengan aplikasi pakan yang memenuhi standar nutrisi.

Capaian anggaran pada TW I pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 174.574.000.

IKSK 6. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: 1) pakan ikan terapung; 2) pakan ikan melayang; dan 3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; dan (6) pellet.

Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:

- disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;
- penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan
- formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi.

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan salah satu program dari DJPB untuk memproduksi secara mandiri pakan ikan yang akan dimanfaatkan oleh UPT itu tersebut. Satker yang melaksanakan indikator tersebut yaitu BBPBL Lampung. Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh satker untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya ikan air laut. Indikator diukur guna

mengoptimalkan unit produksi pakan ikan air laut, memaksimalkan penggunaan bahan baku pakan ikan yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Target tahun 2025 pada indikator ini yaitu 13.927 kg dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	13.927	-	-	-	-	

Pada tabel diatas pada TW I pada pakan ikan air laut yang diproduksi belum ada capaian dikarenakan belum tersedianya bahan baku untuk produksi pakan ikan air laut untuk operasional. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu proses menyusun rencana pengadaan bahan baku.

Anggaran yang terserap pada TW I pada BBPBL Lampung mencapai masih 0 dari pagu Rp 181.900.000.

IKSK 7. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari :

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

- 3) Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan ikan air laut di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.
- 4) Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat ikan air laut di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.
- 5) Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat ikan air laut di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Pembinaan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Tabel 10. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	23	-	-	-	-	

Target tahunan Indikator kinerja Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB) adalah sebanyak 23 (Unit) dan pada Triwulan I belum ada realisasi dikarenakan pengukuran capaian dilaksanakan pada akhir tahun.

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 156.622.000.- dan belum terdapat realisasi anggaran pada triwulan I.

IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

Tabel 11. Capaian Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	1.976	530	2.013	-	101,9	

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki target tahunan sebesar 1.976 (Sampel) dan realisasi triwulan I sebesar 2.013 sampel yang berasal dari layanan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan di 4 UPT DJPB yang mencakup sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	BPBL Batam	744	250	531	71.37
2	BBPBL Lampung	549	135	432	78.69
3	BPBL Lombok	374	72	775	207.22
4	BPBL Ambon	309	73	275	89.00
Jumlah :		1,976	530	2,013	101.87

Berdasarkan data pada tabel 12 di atas, diketahui bahwa perolehan capaian sampel menunjukkan bahwa realisasi sudah mencapai 101,87% dari target tahunan. dan UPT yang meraih capaian tertinggi melampaui target tahunan adalah BPBL Lombok yaitu mencapai 207,22%.

IKSK 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah pegujian nutrisi dan mutu pakan ikan. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofuram, kloramfenikol, oksitertrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji dilaksanakan oleh BBPBL Lampung.

Tabel 13. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	17	5	5	-	29,4	

Indikator pakan ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 17 (Sampel) dan realisasi triwulan I sebanyak 5 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BBPBL Lampung yang dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 14. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji di BBPBL Lampung Triwulan I Tahun 2025

No.	Laboratorium Pengujian UPT	Ruang Lingkup	Target Tahunan (Sampel)	Target TW I (Sampel)	Realisasi TW I (Sampel)
1	BBPBL Lampung	Pakan Ikan Air Laut	17	5	5
TOTAL			17	5	5

Anggaran yang telah terealisasi pada triwulan I untuk mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 6.004.000,- atau sebanyak 67,21% dari total anggaran pengujian sampel pakan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 8.993.000,-

IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. Rekomendasi Kebijakan di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu Kebijakan di bidang residu dan bidang penyakit ikan.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2025 sebanyak 6 (Rekomendasi Kebijakan). 6 rekomendasi kebijakan tersebut, yaitu: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNi bidang produksi dan kesehatan ikan. Target dan Realisasi Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025

No	Rekomendasi Kebijakan	Target	Produk
1	Bidang Kesehatan Ikan	4	- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (1), - Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2), dan - RSNI3 (1)
2	Bidang Produksi	2	RSNI3 (2)
	Total	6	

Tabel 16. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	6	-	-	-	-	

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan Tahun 2025. Pengukuran capaian Indikator kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut dilakukan secara tahunan sehingga pada triwulan I ini belum dapat dilakukan penghitungan.

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 1.000.000.000.- dan sudah terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 89.879.718 atau sekitar 9,10% pada triwulan I

IKSK 11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium. Target merupakan sampel hasil monitoring pada sentra-sentra budiaya ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

Tabel 17. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	70	10	10	-	14,3	

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 70 (Sampel) dan telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 10 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BPKIL Serang yang dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 18. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang Triwulan I Tahun 2025

No.	Laboratorium Pengujian UPT	Ruang Lingkup	Target Tahunan (Sampel)	Target TW I (Sampel)	Realisasi TW I (Sampel)
1	BPKIL Serang	Monitoring Penyakit Ikan Air Laut	70	10	10
TOTAL			70	10	10

Anggaran yang telah terealisasi untuk menunjang Indikator kinerja ini pada triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-

IKSK 12. Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji

Indikator Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Tabel 19. Capaian Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	75	13	27	-	36	

Indikator Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan pada judul dan cara pengukuran penilaian dari tahun 2024. Indikator Pengujian sampel Survailan AMR untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, dengan target indikator kinerja tahunan sebanyak 75 (sampel) dan pada triwulan I sudah terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 27 sampel.

Tabel 20. Rincian target dan realisasi sampel survailan resistensi antimikroba Triwulan I Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	26	12	46,15
2	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	16	6	37,5
3	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	16	0	0
4	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17	9	52,94
Total		75	27	36

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
	BBPBL Lampung	26	Kerapu	8	3
			Kakap	9	6
			Bawal	9	3
	BPBL Batam	16	Kerapu	5	6
			Kakap	8	0
			Bawal	3	0
	BPBL Lombok	16	Kakap	8	0
			Bawal	8	0
	BPBL Ambon	17	Kerapu	4	1
			Kakap	4	2
			Kuwe	9	6
Total				75	27

Anggaran yang terealisasi untuk menunjang indikator ini pada triwulan I adalah sebagai berikut: i) BBPBL Lampung adalah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu Rp.23.839.000,-, ii) BPBL Lombok sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu 14.624.000,-, iii) BPBL Batam sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu Rp. 14.624.000,- dan iv) BPBL Ambon belum ada data realisasi anggaran.

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji (sampel) pada triwulan I yaitu, terdapat UPT DJPB yang belum melakukan pengambilan sampel yaitu BPBL Lombok. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi agar BPBL Lombok dapat melakukan pengujian sampel surveilan resistensi antimikroba pada triwulan II.

IKSK 13. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Diseminasi adalah penyebaran ide, gagasan dan sebagainya. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah kegiatan pelatihan atau pembimbingan

yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu.

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan Kegiatan yang dapat berupa Sosialisasi, Diseminasi dan Bimtek terkait kebijakan, program kerja, bantuan pemerintah, penerapan inovasi teknologi dan kompetensi dalam bidang Perikanan Budi Daya yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 21. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	11.000	-	-	-	-	-

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 11.000 (orang) yang telah disampaikan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek. Pada triwulan I capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

Anggaran yang telah terealisasi untuk menunjang Indikator kinerja ini pada triwulan I di Direktorat Ikan Air Laut adalah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-

IKSK 14. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Klaster komoditas unggulan budidaya air laut berbasis kawasan merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berkaitan dengan komoditas laut dalam suatu kawasan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing, efisiensi produksi, dan nilai tambah bagi komoditas budidaya laut tersebut. Klaster komoditas unggulan budidaya air laut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan menjadi komoditas ekspor. Pengembangan klaster budidaya laut dengan komoditas unggulan bertujuan meningkatkan produksi, efesiensi dan daya saing di pasar internasional.

Indikator Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan ini merupakan kegiatan Pembangunan Klaster komoditas unggulan ikan air laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh BLUPPB Karawang. Komoditas yang akan dikembangkan

adalah kekerangan dengan membangun instalasi budi daya kekerangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Tabel 22. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	1	-	-	-	-	

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 untuk pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp1.619.193.225,- atau sebesar 16,19% dari pagu sebesar Rp10.000.000.000,- (belum dipotong efisiensi). Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang berasal dari rupiah murni (APBN) dan penerimaan BLU. Selain itu, kegiatan pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang mendapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp8.292.360.000,- (82,92%).

Indikator Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 1 (unit) kluster yang sudah dibangun. Pada triwulan I capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 15. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 23. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	81.55	84	-	-	-	-	

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84 (Nilai) dan pada Triwulan I, indikator belum bisa dihitung dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan I, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain : Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan

kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan maupun ekinerjaku sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

IKSK 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- 2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:
 - a) Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b) Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman

- Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

$$IP \text{ ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Tabel 24. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
0	84.18	81	-	-	-	-	

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Indikator Kinerja IP ASN ini memiliki target tahunan sebesar 81 (Indeks) yang akan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara dan pada triwulan I ini belum dapat dilakukan penghitungan karena pengukuran dilakukan pada semester 2 dan semester 4 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada semester 2.

IKSK 17. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Pengelola keuangan negara melaporkan Penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Tabel 25. Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	100	-	-	-	-	

Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (%). Pada triwulan I capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

IKSK 18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Ikan Air Laut.

Tabel 26. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
82,61	80	85	85	92,86	109,3	109,3	88,9

Penetapan target IKU Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebesar 85 (%). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada periode pengukuran 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024)

yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I Tahun 2025), unit kerja Direktorat Ikan Air Laut sebesar 92,86%. Rincian capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut masing-masing Satker Pusat disampaikan pada tabel 23 berikut ini.

Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	88,89
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,86
3	Direktorat Rumput Laut	89,19
4	Direktorat Ikan Air Tawar	92,86
5	Direktorat Ikan Air Payau	92,86

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu mengupayakan langkah tindak lanjut terkait dengan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat T.202/ITJ.3/HP.550/IV/2025, 11 April 2025 mengenai Revisi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP Triwulan I TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang didalamnya menginformasikan bahwa adanya sisa temuan yang tercantum pada LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 di Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan sisa sebanyak satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan sebesar Rp41.426.478,00 belum dilengkapi dengan bukti dukung.

Sampai dengan saat pemantauan 27 Maret 2025, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan (Perubahan SOTK menjadi Direktur Ikan Air Laut) belum melengkapi bukti dukung yang dimaksud sehingga upaya yang harus dilakukan yaitu melakukan telaah/kajian atas sisa temuan pada LHP yang sudah cukup lama (tahun 2015) dan selanjutnya melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud atau mengajukan status Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti (RTDD) kembali kepada Inspektur III.

IKSK 19. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari capaian rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 5 aspek ketatausahaan

dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur. Pengukuran dilakukan dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 85%
- Pengelolaan BMN = 85%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{\text{jumlah pengukuran terhadap 5 aspek}}{\text{jumlah aspek yang diukur}} \times 100\%$$

Tabel 28. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
99.32	94.77	80	-	-	-	-	-

• **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut. Jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang PNS, 6 (enam) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 7 (tujuh) orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada Triwulan I tahun 2025 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

• **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga.

• **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2025. Data BMN yang dilakukan

transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat.

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat.

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :

- a) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- b) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja ini adalah 80 (%). Pada triwulan I capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

IKSK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Tabel 29. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	70	-	-	-	-	

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja ini adalah 70 (nilai). Pada triwulan I capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

IKSK 21. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tabel 30. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut					
IKSK		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut					
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW I 2024 Thd TW I 2025
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I 2024	Terhadap target tahun 2025	
-	-	65	-	-	-	-	-

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja ini adalah 65 (%). Pada triwulan I capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

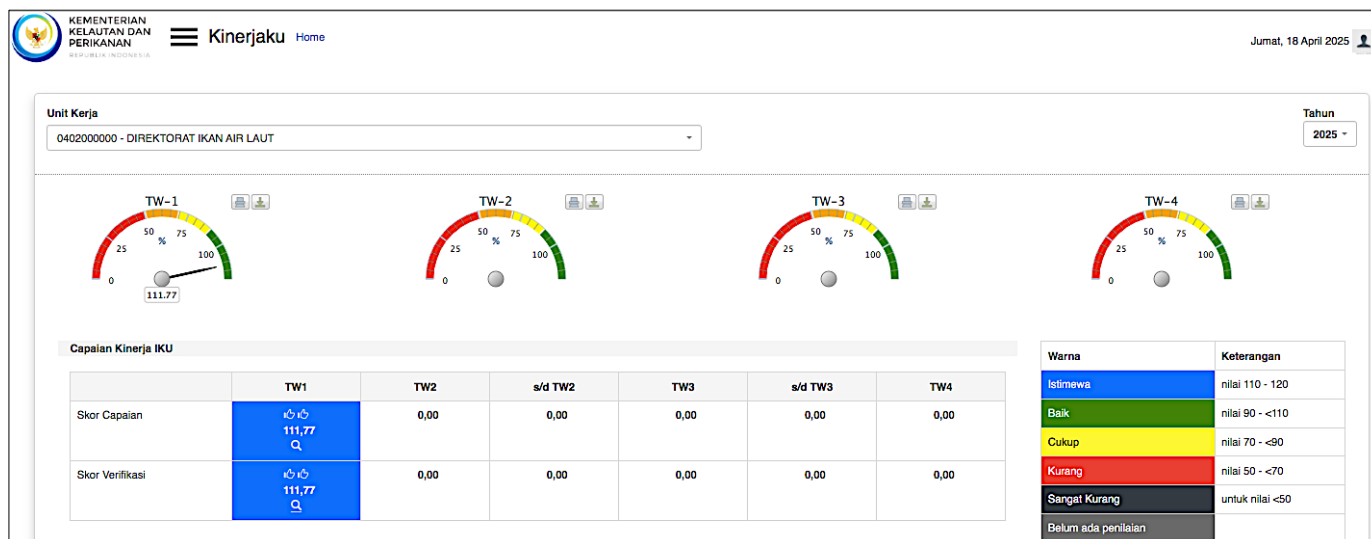
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Januari – Maret 2025. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target tahunan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 3 (tiga) Indikator kinerja yang capaiannya sesuai target tahunan dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan I. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan I mencapai nilai angka “Istimewa”



Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2025

B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Ikan Air Laut merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait,

sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan I Tahun 2025 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025, diketahui bahwa dari 21 (dua puluh satu) Indikator kinerja baru 7 (tujuh) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 14 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan I. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diantaranya: Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti sehingga perlu upaya dalam penyelesaian hasil review terkait.

Diharapkan Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Ikan Air Laut sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan berikutnya.